



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menetapkan :
- a. bahwa sehubungan adanya pergeseran/perubahan/penyesuaian terhadap rincian objek belanja pada objek belanja yang sama dan antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 untuk kedua kalinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

- Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inventasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);
27. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2023 (Berita daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 1017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 1017) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a semula sebesar Rp.675.090.443.798,- (Enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar

Rp.8.442.836.518,- ...

Rp.8.442.836.518,- (Delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.683.533.280.316,- (Enam ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.328.572.421.831,- (Tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.516.420.465,- (Lima ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.329.088.842.296,- (Tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.282.259.825.611,- (Dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp.1.670.300.105,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.280.589.525.506,- (Dua ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.975.330.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.33.219.590.702,- (Tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.9.881.716.158,- (Sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.43.101.306.860,- (Empat puluh tiga miliar seratus satu juta tiga ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.30.063.275.654,- (Tiga puluh miliar enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.29.778.275.654,- (Dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

2. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.328.572.421.831,- (Tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 516.420.465,- (Lima ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.329.088.842.296,- (Tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja penerima lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.236.297.172.495,- (Dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.521.100.465,- (Lima ratus dua puluh satu juta seratus ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.236.818.272.960,- (Dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.50.221.633.871,- (Lima puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.4.680.000,- (Empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.50.216.953.871,- (Lima puluh miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.371.179.150,- (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.161.356.315,- (Delapan miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja penerima lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. Rp.236.297.172.495,- (Dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.521.100.465,- (Lima ratus dua puluh satu juta seratus ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.236.818.272.960,- (Dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.180.863.728.978,- (Seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.1.340.829.819,- (Satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.179.522.899.159,- (Seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.15.041.350.420,- (Lima belas miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.733.129.534,- (Tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.774.479.954,- (Lima belas miliar tujuh ratus tujuh

puluh ...

- puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.5.552.393.600,- (Lima miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.106.942.130,- (Seratus enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.5.659.335.730,- (Lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.11.322.315.700,- (Sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.13.288.500,- (Tiga belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.335.604.200,- (Sebelas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.3.747.895.804,- (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp.355.701.306,- (Tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.103.597.110,- (Empat miliar seratus tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.9.838.154.523,- (Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.408.384.694,- (Empat ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.10.246.539.217,- (Sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.579.861.354,- (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.237.399.032,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.817.260.386,- (Delapan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp.3.371.707,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.3.126.255,- (Tiga juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.497.962,- (Enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp.6.758.372.702,- (Enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.3.581.820,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.761.954.522,- (Enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp.411.612.245,- (Empat ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.102.362,- (Seratus dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.411.714.607,- (Empat ratus sebelas juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp.1.200.535.720,- (Satu miliar dua ratus juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.298.557,- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.200.834.277,- (Satu miliar dua ratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp.977.579.742,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.23.906,- (Dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.977.555.836,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. Rp.50.221.633.871,- (Lima puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.4.680.000,- (Empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.50.216.953.871,- (Lima puluh miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN; dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan ...

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. Rp.15.864.394.646,- (Lima belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.862.744.646,- (Lima belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. Rp.5.486.821.990,- (Lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.5.486.441.990,- (Lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp.44.135.848,- (Empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. Rp.28.826.281.387,- (Dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.2.650.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.28.823.631.387,- (Dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 25 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.282.259.825.611,- (Dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp.1.670.300.105,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.280.589.525.506,- (Dua ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;

e. Belanja ...

- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.43.480.418.249,- (Empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.236.877.720,- (Dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah),- sehingga menjadi sebesar Rp.43.717.295.969,- (Empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.80.788.495.020,- (Delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.196.927.604,- (Seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.80.591.567.416,- (Delapan puluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah)
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.4.321.788.695,- (Empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.334.209.804,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.655.998.499,- (Empat miliar enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.19.658.758.976,- (Sembilan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.154.179.975,- (Seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.19.812.938.951,- (Sembilan belas miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.455.400.000,- (Sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.17.388.920.000,- (Tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.198.640.000,- (Dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.190.280.000,- (Lima belas

miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.107.166.044.671,- (Seratus tujuh miliar seratus enam puluh enam juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b semula sebesar Rp.62.996.571.148,- (Enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.341.403.316,- (Tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.62.655.167.832,- (Enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan; dan
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.24.373.406.676,- (Dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.755.918.299,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.25.129.324.975,- (Dua puluh lima miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.7.608.650.270,- (Tujuh miliar enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.1.291.003.415,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.317.646.855,- (Enam miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.31.014.514.202,- (Tiga puluh satu miliar empat belas

juta lima ratus empat belas ribu dua ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp.91.318.200,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.30.923.196.002,- (Tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu dua rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c semula sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp.1.708.203.960,- (Satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.291.796.040,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a semula sebesar Rp.17.468.054.519,- (Tujuh belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.6.393.229.242,- (Enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.23.861.283.761,- (Dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya semula sebesar Rp.17.468.054.519,- (Tujuh belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.6.393.229.242,- (Enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.23.861.283.761,- (Dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

9. Ketentuan lampiran I diubah dengan ringkasan penjabara perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
10. Ketentuan lampiran II diubah dengan penjabaran perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah dengan rincian penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 23 Juni 2023 M
4 Dzulhijjah 1444 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 Juni 2023 M
4 Dzulhijjah 1444 H

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1038

Lampiran I : Peraturan Walikota Langsa
 Nomor : 16 Tahun 2023
 Tanggal : 23 Juni 2023

KOTA LANGSA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	148.049.743.069	148.049.743.069	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	21.015.000.000	21.015.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	750.000.000	750.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000	750.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000	750.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9.480.000.000	9.480.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.480.000.000	9.480.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.480.000.000	9.480.000.000	0	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	50.000.000	50.000.000	0	0 %

4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	760.000.000	760.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	760.000.000	760.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	760.000.000	760.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.790.000.000	3.790.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	3.790.000.000	3.790.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.790.000.000	3.790.000.000	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.738.823.000	4.738.823.000	0	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.607.600.000	2.607.600.000	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	560.600.000	560.600.000	0	0 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	560.600.000	560.600.000	0	0 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	365.000.000	365.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	365.000.000	365.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000	750.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000	750.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000	550.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	550.000.000	550.000.000	0	0 %
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000	17.000.000	0	0 %
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000	17.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000	115.000.000	0	0 %

4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000	115.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.000.000	215.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.000.000	215.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.680.700.000	1.680.700.000	0	0 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.579.700.000	1.579.700.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.051.800.000	1.051.800.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	77.900.000	77.900.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	400.000.000	400.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	31.500.000	31.500.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	31.500.000	31.500.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.500.000	41.500.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	41.500.000	41.500.000	0	0 %
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	450.523.000	450.523.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	423.000.000	423.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	423.000.000	423.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.523.000	7.523.000	0	0 %
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	7.523.000	7.523.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %

4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.005.920.069	121.005.920.069	0	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000	600.000.000	0	0 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	112.852.182.671	112.852.182.671	0	0 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	112.852.182.671	112.852.182.671	0	0 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	112.852.182.671	112.852.182.671	0	0 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1.228.737.398	1.228.737.398	0	0 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.228.737.398	1.228.737.398	0	0 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.228.737.398	1.228.737.398	0	0 %
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	4.025.000.000	4.025.000.000	0	0 %
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	4.025.000.000	4.025.000.000	0	0 %
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.025.000.000	2.025.000.000	0	0 %
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	677.748.666.358	677.748.666.358	0	0 %

4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	620.822.143.000	620.822.143.000	0	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	564.276.403.000	564.276.403.000	0	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.091.970.000	13.091.970.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.928.789.000	1.928.789.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.788.051.000	5.788.051.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	186.027.000	186.027.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.206.594.000	1.206.594.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.597.000	8.597.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.633.366.000	2.633.366.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	39.169.000	39.169.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.301.377.000	1.301.377.000	0	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	422.491.297.000	422.491.297.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	411.786.829.000	411.786.829.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.704.468.000	10.704.468.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.890.469.000	54.890.469.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	441.905.000	441.905.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.563.882.000	2.563.882.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.208.422.000	7.208.422.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.531.871.000	1.531.871.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	15.620.838.000	15.620.838.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.049.000.000	5.049.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.227.878.000	6.227.878.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	11.797.867.000	11.797.867.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	476.307.000	476.307.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.972.499.000	3.972.499.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.802.667.000	73.802.667.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.329.900.000	19.329.900.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.925.000.000	1.925.000.000	0	0 %

4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.348.268.000	29.348.268.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	909.000.000	909.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.315.600.000	3.315.600.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.208.300.000	3.208.300.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.571.645.000	10.571.645.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000	334.994.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.399.040.000	2.399.040.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	406.900.000	406.900.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000	598.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	335.650.000	335.650.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMIK	420.370.000	420.370.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	56.545.740.000	56.545.740.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	56.545.740.000	56.545.740.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	56.545.740.000	56.545.740.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.926.523.358	56.926.523.358	0	0 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.123.797.394	27.123.797.394	0	0 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.123.797.394	27.123.797.394	0	0 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.400.606.122	5.400.606.122	0	0 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.729.571.105	2.729.571.105	0	0 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.175.153.765	8.175.153.765	0	0 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	29.723.383	29.723.383	0	0 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.788.743.019	10.788.743.019	0	0 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	29.802.725.964	29.802.725.964	0	0 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	29.802.725.964	29.802.725.964	0	0 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.802.725.964	29.802.725.964	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	825.798.409.427	825.798.409.427	0	0 %
5	BELANJA				

5.1	BELANJA OPERASI	675.090.443.798	683.533.280.316	8.442.836.518	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	328.572.421.831	329.088.842.296	516.420.465	0 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	236.297.172.495	236.818.272.960	521.100.465	0 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	180.863.728.978	179.522.899.159	(1.340.829.819)	1 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	170.396.344.036	164.365.144.084	(6.031.199.952)	4 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.467.384.942	15.157.755.075	4.690.370.133	45 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.041.350.420	15.774.479.954	733.129.534	5 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.250.650.230	14.222.339.753	(28.310.477)	0 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	790.700.190	1.552.140.201	761.440.011	96 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.552.393.600	5.659.335.730	106.942.130	2 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.552.393.600	5.659.335.730	106.942.130	2 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.322.315.700	11.335.604.200	13.288.500	0 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.226.921.100	11.211.321.100	(15.600.000)	0 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	95.394.600	124.283.100	28.888.500	30 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.747.895.804	4.103.597.110	355.701.306	9 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.128.393.704	3.154.563.857	26.170.153	1 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	619.502.100	949.033.253	329.531.153	53 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.838.154.523	10.246.539.217	408.384.694	4 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.205.648.567	9.242.740.876	37.092.309	0 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	632.505.956	1.003.798.341	371.292.385	59 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	579.861.354	817.260.386	237.399.032	41 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	579.861.354	817.260.386	237.399.032	41 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.371.707	6.497.962	3.126.255	93 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.253.533	3.281.180	27.647	1 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	118.174	3.216.782	3.098.608	2.622 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.758.372.702	6.761.954.522	3.581.820	0 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.465.151.370	6.468.733.190	3.581.820	0 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	293.221.332	293.221.332	0	0 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	411.612.245	411.714.607	102.362	0 %

5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	383.247.858	383.350.220	102.362	0 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	28.364.387	28.364.387	0	0 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.200.535.720	1.200.834.277	298.557	0 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.117.806.256	1.118.104.813	298.557	0 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	82.729.464	82.729.464	0	0 %
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	977.579.742	977.555.836	(23.906)	0 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	921.289.317	921.265.411	(23.906)	0 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	56.290.425	56.290.425	0	0 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.221.633.871	50.216.953.871	(4.680.000)	0 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.864.394.646	15.862.744.646	(1.650.000)	0 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.736.324.011	15.734.674.011	(1.650.000)	0 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	128.070.635	128.070.635	0	0 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.486.821.990	5.486.441.990	(380.000)	0 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.453.306.922	5.452.926.922	(380.000)	0 %
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	33.515.068	33.515.068	0	0 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	44.135.848	44.135.848	0	0 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	44.135.848	44.135.848	0	0 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	28.826.281.387	28.823.631.387	(2.650.000)	0 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	28.581.918.444	28.579.268.444	(2.650.000)	0 %
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	244.362.943	244.362.943	0	0 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.371.179.150	33.371.179.150	0	0 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.050.750.000	1.050.750.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	75.000.000	75.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.750.000	1.750.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	37.500.000	37.500.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	474.000.000	474.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.500.000	2.500.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.000.000	5.000.000	0	0 %

5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000	2.500.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Logam dan Batuan	38.000.000	38.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	189.500.000	189.500.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	212.181.150	212.181.150	0	0 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.270.000	3.270.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan/Persampahan/Kebersihan	18.250.000	18.250.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	39.050.000	39.050.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	850.000	850.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	5.750.000	5.750.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.750.000	1.750.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.750.000	10.750.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	77.435.000	77.435.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	27.500.000	27.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.575.000	1.575.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.075.000	2.075.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	250.000	250.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000	150.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-izin Mendirikan Bangunan	21.150.000	21.150.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-izin Usaha Perikanan	376.150	376.150	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.348.268.000	29.348.268.000	0	0 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29.348.268.000	29.348.268.000	0	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	909.000.000	909.000.000	0	0 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	909.000.000	909.000.000	0	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.850.980.000	1.850.980.000	0	0 %

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.843.420.000	1.843.420.000	0	0 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.560.000	7.560.000	0	0 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.161.356.315	8.161.356.315	0	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	78.615.600	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	78.615.600	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000	90.694.000	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000	90.694.000	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500	48.220.500	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500	48.220.500	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000	814.359.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000	814.359.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900	79.839.900	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900	79.839.900	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900	10.413.900	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900	10.413.900	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000	157.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000	157.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000	230.000.000	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000	230.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.560.173.415	1.560.173.415	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	53.203.415	53.203.415	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	149.170.000	149.170.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.400.000	11.400.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.346.400.000	1.346.400.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000	2.640.000.000	0	0 %

5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000	2.640.000.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	10.200.000	10.200.000	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000	1.400.000	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000	1.400.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000	510.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.259.825.611	280.589.525.506	(1.670.300.105)	1 %
5.1.02.01	Belanja Barang	43.480.418.249	43.717.295.969	236.877.720	1 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.478.850.149	43.715.727.869	236.877.720	1 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	115.454.543	115.454.543	0	0 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.953.738.072	2.982.808.072	29.070.000	1 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.765.037.933	1.765.037.933	0	0 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.236.080	2.236.080	0	0 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	24.760.000	24.760.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.607.002.465	1.607.002.465	0	0 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	790.973.253	790.973.253	0	0 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	199.999.500	199.999.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	511.386.819	511.386.819	0	0 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.216.390.480	3.224.008.392	7.617.912	0 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.138.723.925	4.230.357.333	91.633.408	2 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	299.520.000	299.040.000	(480.000)	0 %

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	85.658.000	175.480.000	89.822.000	105 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	772.781.640	772.781.640	0	0 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	72.640.000	72.640.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	531.390.000	531.390.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	574.209.000	534.209.000	(40.000.000)	7 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.630.770.192	2.630.770.192	0	0 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	291.495.113	291.495.113	0	0 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.799.200.000	9.799.200.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	572.392.180	572.393.080	900	0 %
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	632.500	632.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.384.740.000	1.384.740.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.422.460.454	2.443.482.954	21.022.500	1 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.747.780.000	2.829.780.000	82.000.000	3 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	374.900.000	374.900.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	83.000.000	83.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	34.650.000	34.650.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.609.445.000	3.541.567.000	(67.878.000)	2 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	215.000.000	215.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	191.000.000	191.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.538.000	35.538.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.500.000	112.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.750.000	22.750.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	700.000	700.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	626.720.000	626.720.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	242.500.000	251.223.600	8.723.600	4 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	256.775.000	272.120.400	15.345.400	6 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.568.100	1.568.100	0	0 %

5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.568.100	1.568.100	0	0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	80.788.495.020	80.591.567.416	(196.927.604)	0 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.886.276.525	73.420.808.921	(465.467.604)	1 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.623.500.000	3.731.500.000	108.000.000	3 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.649.535.000	3.649.785.000	250.000	0 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.230.730.000	1.230.730.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	849.600.000	849.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	683.200.000	683.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.303.501.309	9.303.501.309	0	0 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.600.000	9.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	224.400.000	224.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.913.440.000	6.913.440.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.200.640.000	3.200.640.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	385.800.000	385.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	795.600.000	795.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	153.600.000	153.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	357.000.000	357.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.500.000	12.300.000	1.800.000	17 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.552.500.000	7.552.800.000	300.000	0 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	557.400.000	562.200.000	4.800.000	1 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.890.170.000	2.890.170.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.867.502.632	2.868.252.632	750.000	0 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.185.640.000	9.185.640.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.340.840.000	2.350.840.000	10.000.000	0 %
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	204.000.000	204.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.081.600.000	1.081.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.600.000	30.600.000	0	0 %

5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	73.890.000	73.890.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.800.000	20.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	160.900.000	160.900.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	11.260.000	11.260.000	100 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	402.500.000	402.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	132.500.000	132.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.700.000	18.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	175.000.000	175.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.390.395.000	2.390.395.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	43.200.000	43.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	111.400.000	111.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	315.264.837	315.264.837	0	0 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.812.646.157	9.210.134.553	(602.511.604)	6 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	213.300.000	213.300.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.007.994.990	1.007.878.990	(116.000)	0 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	151.509.600	151.509.600	0	0 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	454.177.000	454.177.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	103.700.000	103.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	112.500.000	112.500.000	0	0 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.435.215.136	1.435.215.136	0	0 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	189.638.400	189.638.400	0	0 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	702.374.400	702.374.400	0	0 %
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	458.202.336	458.202.336	0	0 %
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000	85.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	687.348.000	843.448.000	156.100.000	23 %
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	99.704.000	99.704.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	210.948.000	220.948.000	10.000.000	5 %

5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.000.000	12.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.496.000	10.496.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	24.000.000	24.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	150.000.000	165.000.000	15.000.000	10 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	180.200.000	311.300.000	131.100.000	73 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.469.972.800	1.528.372.800	58.400.000	4 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	55.000.000	55.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	799.672.800	858.072.800	58.400.000	7 %
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	130.000.000	130.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	16.300.000	16.300.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	469.000.000	269.000.000	(200.000.000)	43 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	850.702.559	950.702.559	100.000.000	12 %
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	348.972.891	448.972.891	100.000.000	29 %
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	160.000.000	160.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	241.729.668	241.729.668	0	0 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.000.000	34.420.000	24.420.000	244 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	10.000.000	34.420.000	24.420.000	244 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.02.10.0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	62.000.000	62.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	42.000.000	42.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.176.980.000	2.106.600.000	(70.380.000)	3 %

5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	824.990.000	730.190.000	(94.800.000)	11 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	892.120.000	920.020.000	27.900.000	3 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	345.980.000	342.500.000	(3.480.000)	1 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	113.890.000	113.890.000	0	0 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.321.788.695	4.655.998.499	334.209.804	8 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.298.357.104	2.482.566.908	184.209.804	8 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	200.300.000	384.509.804	184.209.804	92 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	76.248.000	76.248.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	124.162.500	124.162.500	0	0 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penuumpang	782.774.772	782.774.772	0	0 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	93.831.832	93.831.832	0	0 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	120.640.000	120.640.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	395.100.000	395.100.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	75.000.000	75.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	305.500.000	305.500.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	84.800.000	84.800.000	0	0 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.023.431.591	2.023.431.591	0	0 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.898.431.591	1.898.431.591	0	0 %
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	75.000.000	75.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	150.000.000	150.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampungan Sampah	0	150.000.000	150.000.000	100 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.658.758.976	19.812.938.951	154.179.975	1 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.658.758.976	19.812.938.951	154.179.975	1 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.391.518.300	12.580.592.300	189.074.000	2 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.267.240.676	7.232.346.651	(34.894.025)	0 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.455.400.000	9.455.400.000	0	0 %

5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.444.300.000	9.444.300.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	794.300.000	794.300.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	21.250.000	21.250.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	68.750.000	68.750.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.560.000.000	8.560.000.000	0	0 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.100.000	11.100.000	0	0 %
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.100.000	11.100.000	0	0 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000	15.190.280.000	(2.198.640.000)	13 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000	15.190.280.000	(2.198.640.000)	13 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000	15.190.280.000	(2.198.640.000)	13 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671	107.166.044.671	0	0 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671	107.166.044.671	0	0 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671	107.166.044.671	0	0 %
5.1.04	Belanja Subsidi	975.330.000	975.330.000	0	0 %
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000	676.930.000	0	0 %
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000	676.930.000	0	0 %
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000	676.930.000	0	0 %
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000	298.400.000	0	0 %
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000	298.400.000	0	0 %
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000	298.400.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	33.219.590.702	43.101.306.860	9.881.716.158	30 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.444.120.684	39.577.536.842	7.133.416.158	22 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.991.441.960	13.897.984.016	(93.457.944)	1 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.238.900.000	8.238.900.000	0	0 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.752.541.960	5.659.084.016	(93.457.944)	2 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.139.000.000	5.139.000.000	0	0 %

	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.139.000.000	5.139.000.000	0	0 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.313.678.724	5.139.000.000	0	0 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.226.874.102	20.540.552.826	0	54 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.630.000.000	11.023.229.242	0	138 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.683.678.724	9.517.323.584	0	10 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0	2.748.300.000	0	100 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	1.735.200.000	0	100 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	1.735.200.000	0	100 %
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0	1.013.100.000	0	100 %
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0	1.013.100.000	0	100 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.063.275.654	29.778.275.654	(285.000.000)	1 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.050.328.452	20.050.328.452	0	0 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	345.980.000	345.980.000	0	0 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	345.980.000	345.980.000	0	0 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	19.704.348.452	19.704.348.452	0	0 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	19.704.348.452	19.704.348.452	0	0 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	9.582.747.202	9.297.747.202	(285.000.000)	3 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.455.000.000	1.170.000.000	(285.000.000)	20 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.455.000.000	1.170.000.000	(285.000.000)	20 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.127.747.202	8.127.747.202	0	0 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.127.747.202	8.127.747.202	0	0 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000	430.200.000	0	0 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000	430.200.000	0	0 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000	430.200.000	0	0 %

5.2	BELANJA MODAL	62.996.571.148	62.655.167.832	(341.403.316)	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	285.000.000	285.000.000	100 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0	285.000.000	285.000.000	100 %
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0	285.000.000	285.000.000	100 %
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0	285.000.000	285.000.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.373.406.676	25.129.324.975	755.918.299	3 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	22.900.000	22.900.000	0	0 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	22.900.000	22.900.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.900.000	2.900.000	0	0 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.150.000.000	1.150.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.150.000.000	1.150.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.946.122.491	1.934.042.491	(12.080.000)	1 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.874.296.691	1.862.216.691	(12.080.000)	1 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	790.803.273	783.723.273	(7.080.000)	1 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.730.000	2.730.000	0	0 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	337.747.118	337.747.118	0	0 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	743.016.300	738.016.300	(5.000.000)	1 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.825.800	31.825.800	0	0 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.903.000	1.903.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	29.922.800	29.922.800	0	0 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	225.076.000	225.076.000	0	0 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	167.496.000	167.496.000	0	0 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	108.084.900	108.084.900	0	0 %
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	23.736.000	23.736.000	0	0 %

5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	35.675.100	35.675.100	0	0 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	57.580.000	57.580.000	0	0 %
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	55.000.000	55.000.000	0	0 %
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	2.580.000	2.580.000	0	0 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.089.660.643	9.089.660.643	0	0 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.400.000	2.400.000	0	0 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.400.000	2.400.000	0	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.087.260.643	9.087.260.643	0	0 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.087.260.643	9.087.260.643	0	0 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.980.786.208	1.980.786.208	1.158.896.499	59 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.980.786.208	1.980.786.208	1.158.896.499	59 %
5.2.02.08.01.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	1.980.786.208	1.980.786.208	1.158.896.499	59 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.826.168.337	1.984.930.137	158.761.800	9 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.149.752.276	1.274.014.076	124.261.800	11 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.149.752.276	1.274.014.076	124.261.800	11 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	676.416.061	710.916.061	34.500.000	5 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	676.416.061	710.916.061	34.500.000	5 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	129.632.000	129.632.000	0	0 %
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	119.632.000	119.632.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	5.200.000	5.200.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	99.550.000	99.550.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	14.882.000	14.882.000	0	0 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	450.942.997	450.942.997	0	0 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	450.942.997	450.942.997	0	0 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Lainnya	450.942.997	450.942.997	0	0 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000	3.316.320.000	(549.660.000)	14 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000	3.316.320.000	(549.660.000)	14 %

5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000	3.316.320.000	(549.660.000)	14 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000	3.686.138.000	0	0 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000	3.686.138.000	0	0 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000	3.686.138.000	0	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.608.650.270	6.317.646.855	(1.291.003.415)	17 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.633.001.389	3.341.997.974	(1.291.003.415)	28 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.118.001.389	2.826.997.974	(1.291.003.415)	31 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.822.886.580	1.682.699.664	(140.186.916)	8 %
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.258.896.499	0	(1.258.896.499)	100 %
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	624.410.800	624.410.800	0	0 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	93.457.944	93.457.944	0	0 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0	108.080.000	108.080.000	100 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.349.566	18.349.566	0	0 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	515.000.000	515.000.000	0	0 %
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	515.000.000	515.000.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	975.648.881	975.648.881	0	0 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	975.648.881	975.648.881	0	0 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	975.648.881	975.648.881	0	0 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.014.514.202	30.923.196.002	(91.318.200)	0 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.374.011.265	17.614.993.065	240.981.800	1 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	15.600.822.013	15.683.443.813	82.621.800	1 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	13.745.538.013	13.828.159.813	82.621.800	1 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.855.284.000	1.855.284.000	0	0 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.773.189.252	1.931.549.252	158.360.000	9 %
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	923.189.252	1.081.549.252	158.360.000	17 %

5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	850.000.000	850.000.000	0	0	0 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.935.404.287	11.053.104.287	117.700.000	117.700.000	1 %
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	5.777.620.287	5.777.620.287	0	0	0 %
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	5.777.620.287	5.777.620.287	0	0	0 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	117.700.000	117.700.000	117.700.000	100 %
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	117.700.000	117.700.000	117.700.000	100 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.157.784.000	5.157.784.000	0	0	0 %
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.157.784.000	5.157.784.000	0	0	0 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.705.098.650	2.255.098.650	(450.000.000)	(450.000.000)	17 %
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	600.000.000	150.000.000	(450.000.000)	(450.000.000)	75 %
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampungan Sampah	600.000.000	0	(600.000.000)	(600.000.000)	100 %
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100 %
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	2.105.098.650	2.105.098.650	0	0	0 %
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	2.105.098.650	2.105.098.650	0	0	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	291.796.040	(1.708.203.960)	(1.708.203.960)	85 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	291.796.040	(1.708.203.960)	(1.708.203.960)	85 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	291.796.040	(1.708.203.960)	(1.708.203.960)	85 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	291.796.040	(1.708.203.960)	(1.708.203.960)	85 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	291.796.040	(1.708.203.960)	(1.708.203.960)	85 %
5.4	BELANJA TRANSFER	102.679.449.000	102.679.449.000	0	0	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.575.382.300	2.575.382.300	0	0	0 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.101.500.000	2.101.500.000	0	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.101.500.000	2.101.500.000	0	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.101.500.000	2.101.500.000	0	0	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	473.882.300	473.882.300	0	0	0 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	473.882.300	473.882.300	0	0	0 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	473.882.300	473.882.300	0	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.104.066.700	100.104.066.700	0	0	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.104.066.700	100.104.066.700	0	0	0 %

5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.104.066.700	100.104.066.700	0	0 %
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	56.545.740.000	56.545.740.000	0	0 %
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	43.558.326.700	43.558.326.700	0	0 %
	Jumlah Belanja	842.766.463.946	849.159.693.188	6.393.229.242	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(16.968.054.519)	(23.361.283.761)	(6.393.229.242)	-38 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.468.054.519	23.861.283.761	6.393.229.242	37 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.468.054.519	23.861.283.761	6.393.229.242	37 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	6.393.229.242	6.393.229.242	100 %
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0	6.393.229.242	6.393.229.242	100 %
6.1.01.01.04.0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0	6.393.229.242	6.393.229.242	100 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	17.468.054.519	17.468.054.519	0	0 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	17.468.054.519	17.468.054.519	0	0 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	17.468.054.519	17.468.054.519	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000	500.000.000	6.393.229.242	37 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	16.968.054.519	23.361.283.761	6.393.229.242	38 %
		0	0	0	0 %

Pj. Walikota Langsa



SAID MAHDUM MAJID